

BAB VI

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dapat tarik kesimpulan: Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Bajak Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai.

1. Komunikasi

Dilihat dari Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa tetapi masyarakat sendiri kurang berpartisipasi karena masyarakat sangat kecewa mengikuti kegiatan perumusan kebijakan ADD. Bukan itu saja, ketidaktahuan tentang manfaat dari ADD yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi pada setiap pelaksanaan program yang telah dirumuskan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan adalah staf pelaksana, dan kemampuan sumber daya manusia baik dilihat dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan saran penunjang lainnya

3. Disposisi

Implementasi kebijakan ADD dalam hal ini pelaksanaan belum optimal dalam komitmen pengelola dilihat dari penggunaan ADD yang hanya ditujukan untuk penyelenggaraan desa saja yang meliputi peningkatan

SDM aparat desa sampai pemenuhan peralatan kantor. Untuk pemerataan pendapatan dan peningkatan swadaya rotong royong untuk masyarakat masih kurang.

4. Struktur Organisasi

dilihat dari pengelola pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan pengelolaan ADD sudah berjalan baik, karena penyusunan program pembangunan sudah sesuai dengan teknis atau petunjuk pemerintah

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan dan konsep baru yang diperoleh melalui serangkaian aktivitas dalam penelitian ilmiah ini dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Perlu melaksanakan sosialisasi pengelolaan ADD secara rutin serta memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan
2. Perlu bantuan dana pendidikan formal dan pelatihan untuk pengelolaan dana ADD, kepada Kepala Desa dan sekretaris desa serta aparat desa lainnya untuk peningkatan SDM, melalui bantuan dana pendidikan formal serta pengadaan papan informasi di kantor desa.
3. Perumusan rancangan kerja desa harus betul-betul di jalankan secara konsisten yang berbasis kepada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa perlu membangun koordinasi kepada semua pihak yang ada di Desa Bajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Agustino. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy
- Anderson, James, 1979, Public Policy Making (Second ed.), New York: Holt Renohart and Winston, New York.
- Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta. 2003
- Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press:Yogyakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs, 2003. Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAP
- Kaban, 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Parsons, Wayne. Public Policy: PengantarTeori dan Analisis Kebijakan. Jakarta. Kencana. 2008
- Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. ALFABETA
- Widodo, Joko 2001, Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insani Cendikia, Surabaya
- Grindle, Marilee. S. 2006 . Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey: Princeton University Press.
- Edwards III, George C. 2005. Implementing Public Policy. Washington: Cogressional Quaerterly Inc.
- Meter Donald Van, Dan Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Dalam Administration And Society 6, 1975*, London: Sage.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta:Elex Media Komputindo.